

**EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN
BAHAN PUSTAKA TERHADAP KEDISIPLINAN PEMUSTAKA DI KANTOR
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh : Riski Tri Wismanawati, Drs. Aan Permana, M.M.*

E-mail: riskitwismana@gmail.com

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif. Adapun sampel yang digunakan 13 responden. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi dan wawancara. Uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Penelitian ini memanfaatkan teori efektivitas sebagai dimensi indikator (pencapaian tujuan, integritas, adaptasi dan kedisiplinan) untuk memperoleh data dari responden. Hasil penelitian yang telah dilakukan dan diambil kesimpulan dengan distribusi frekuensi bahwa efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas dalam kategori sedang yang menunjukkan skor rata – rata nilai efektivitas sebesar 38,5 berada dalam interval 37,1 – 39,9.

Kata Kunci: efektivitas, kebijakan, sanksi administratif, kedisiplinan

Abstract

The purpose of the study was to determine the effectiveness of administrative sanctions for the late return of library materials against user's discipline in The Library and Regional Archives Office of Banyumas. This research used quantitative method with descriptive analytic. There were 13 respondents involved. Types and data sources were primary and secondary data sources. The collecting technique used questionnaire, observation and interview. Instruments test used validity and reliability testing. This research utilized the theory of effectiveness as the dimension of the indicator (goal achievement, integrity, adaptation and discipline) to obtain data from the respondents. The results of the research that has been done and concluded by the frequency distribution showed that the effectiveness of administrative sanctions for the late return of library materials against user's discipline in Library and Regional Archives Office of Banyumas was in medium category and showed the average score of the effectiveness in 38,5 and also exist in the interval 37,1 to 39.9.

Keywords: effectiveness, policy, administrative sanctions, discipline

*Dosen Pembimbing

1. Pendahuluan

Perpustakaan kabupaten memberikan fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi *cultural*, dan sebagai sarana simpan karya manusia yang tercermin dalam kegiatan perpustakaan. Kegiatan - kegiatan tersebut perlu adanya kebijakan yang mengatur pelaksanaannya. Salah satu instrumen yang dapat diterapkan untuk merealisasikan kebijakan di perpustakaan adalah tata tertib dalam bentuk penerapan sanksi. Penerapan sanksi memberikan ancaman bagi pengunjung sebagai pengguna perpustakaan untuk selalu mentaati dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan perpustakaan. Oleh karena itu, penerapan sanksi dapat menumbuhkan kedisiplinan diri pengunjung perpustakaan sehingga manfaat perpustakaan dapat diperoleh secara optimal.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas memberikan akses selonggar-longgarnya dengan tidak memungut biaya apapun kepada anggotanya untuk memanfaatkan perpustakaan. Namun, kelonggaran tersebut tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Terdapat sanksi yang dapat diterima oleh pemustaka jika melanggar kebijakan yang telah ditetapkan. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas menerapkan sistem sanksi administratif jika anggota perpustakaan diketahui telah melanggar kebijakan. Pengelola atau petugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas dengan sengaja tidak menerapkan denda berupa uang pada keterlambatan pengembalian bahan pustaka untuk menanamkan kedisiplinan pemustaka dan menumbuhkan kesadaran pemustaka terhadap kebutuhan informasi yang harus dipenuhinya.

Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pemustakan dalam mengembalikan bahan pustaka yang telah dipinjam, namun pada kenyataannya penerapan kebijakan ini tidak memberikan hasil yang maksimal. Seperti yang dikatakan Fuad Z. A. Pustakawan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas bahwa masih banyak pemustaka yang terlambat untuk mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tentang efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui bagaimana efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Landasan Teori

2.1. Efektivitas

Supriyono dalam skripsi Huggo Suragawa (2010) mengatakan Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan sesuai target yang ingin diperoleh. Richard M. Steers yang dikutip Duncan dalam buku Adam Ibrahim (2009) mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Penelitian ini menggunakan ukuran efektivitas menurut Richard M. Steers dalam mengukur efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Adapun penjelasan mengenai ukuran yang dipakai sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Penelitian ini akan menggunakan faktor-faktor pencapaian tujuan seperti kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran merupakan target yang kongkrit, dasar hukum sebagai tolak ukur efektivitas sanksi administratif pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Peneliti mengukurr

efektifitas sanksi administratif menggunakan faktor prosedur yang digunakan dan proses sosialisai. Perumusan, penerapan, dan pelaksanaan sanksi administratif akan dinilai efektif jika dilakukan dengan baik berdasarkan prosedur yang ada. Proses sosialisasi sanksi administratif terhadap pemustaka atau pun pihak lain yang terlibat dalam perumusan, penerapan, dan pelaksanaan sanksi administratif dikatakan efektif jika ada *feedback* yang baik dari pihak luar perpustakaan.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan – perubahan yang terjadi di lingkungannya. Tolak ukur efektivitas dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana adaptasi. Sanksi dikatakan efektif jika terjadi peningkatan kemampuan, dalam penelitian ini berarti terjadi peningkatan kedisiplinan pemustaka dalam mengembalikan bahan pustaka secara tepat waktu. Sedangkan tolak ukur lain adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung penerapan dan pelaksanaan sanksi administratif, seperti adanya *software* otomasi perpustakaan.

Penelitian ini menyoroti efektivitas sanksi administratif berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kedisiplinan pemustaka dalam mengembalikan bahan pustaka dengan tepat waktu.

2.2. Layanan Sirkulasi

Menurut Sulisty-Basuki (1994:100) data yang mencakup kegiatan sirkulasi ialah data peminjam, buku yang dipinjam, tanggal jatuh waktu, tanggal pengembalian sesungguhnya, denda yang dilakukan beserta jumlahnya, waktu peminjaman yang berbeda antara tiap-tiap koleksi yang dipinjam.

Petugas bagian sirkulasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan sirkulasi di perpustakaan. Hal itu dikarenakan bagian sirkulasi selalu berhadapan langsung dengan pengunjung, sehingga petugas sirkulasi lebih memahami kebutuhan dan keinginan pemustaka. Hal tersebut petugas sirkulasi harus bekerja sama dengan bagian pengembangan koleksi dan pengolahan koleksi dalam pelaksanaan kegiatan sirkulasi. Kegiatan pada

layanan sirkulasi dibuat berdasarkan fungsi dari layanan sirkulasi. Menurut F. Rahayuningsih (2007:95) kegiatan pada layanan sirkulasi sebagai berikut:

- a. Pendaftaran anggota perpustakaan
- b. Peminjaman
- c. Pengembalian dan atau perpanjangan,
- d. Penagihan,
- e. Pemberian sanksi bagi pengguna yang melakukan pelanggaran.

Jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain:

1. Keterlambatan pengembalian koleksi
2. Membawa koleksi tanpa melalui prosedur yang benar
3. Mengembalikan koleksi dalam keadaan rusak
4. Menghilangkan koleksi yang dipinjam
5. Melanggar peraturan perpustakaan.

Jenis sanksi yang diberikan:

1. Sanksi denda, besarnya ditentukan oleh kebijakan perpustakaan.
2. Sanksi administrasi, misalnya tidak boleh meminjamkan koleksi dalam kurun waktu tertentu, atau dikeluarkan dari keanggotaan perpustakaan.
3. Beres administrasi perpustakaan.

- f. Beres administrasi perpustakaan
- g. Statistik.

2.3. Kebijakan

Menurut Edi Suharto (2007:3) “kebijakan adalah hasil adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology, dan kepentingan – kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara.” Kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok suatu organisasi atau lembaga, untuk memperoleh tujuan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

Menurut Edi Suharto (2007:44) bahwa “Idealnya perumusan kebijakan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan segenap lapisan masyarakat yang terkena kebijakan itu.” Hal ini yang menjadi *stakeholders* dalam perumusan kebijakan *intern* di perpustakaan adalah pejabat pemerintah/lembaga induk perpustakaan bernaung, petugas perpustakaan, dan pengunjung perpustakaan. Adapun perumusan kebijakan menurut Edi Suharto sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi isu kebijakan

2. Merumuskan agenda kebijakan
3. Melakukan konsultasi
4. Menetapkan keputusan
5. Implementasi
6. Evaluasi

.(Suharto, Edi 2007:26)

Tahapan - tahapan di atas digunakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas dalam menyusun kebijakan yang mengatur seluruh kegiatan perpustakaan. Selain itu juga mengacu pada UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7495:2009 tentang perpustakaan umum kabupaten/kota sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan perpustakaan umum kabupaten di Indonesia.

Penerapan kebijakan memerlukan instrumen sebagai alat untuk merealisasikan kebijakan secara efektif. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan hukum atau aturan sebagai instrumen kebijakan yang efektif. Efektivitas hukum di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas diwujudkan dalam bentuk sanksi administratif.

2.4.Sanksi

Soerjono Soekanto (1985:37) menyatakan “sanksi adalah persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Sanksi dapat dibagi menjadi sanksi positif dan sanksi negatif.” Sanksi positif dapat menimbulkan suatu rangsangan untuk tidak melakukan tindakan tercela. Sedangkan sanksi negatif menimbulkan rangsangan tindakan tercela atau tidak terpuji.

Secara konvensional sanksi positif akan memberikan suatu imbalan terhadap suatu tindakan, sedangkan sanksi negatif memberikan suatu hukuman. Ada anggapan sanksi negatif lebih efektif karena ancaman hukuman mempunyai efek menakutkan, sedangkan imbalan merupakan suatu *intensive* belaka (Soekanto, 1985:89). Hal ini digunakan perpustakaan untuk menjaga aset yang dimiliki agar tetap dapat dimanfaatkan pemustaka atau pengunjung sepenuhnya. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan sanksi negatif yaitu sanksi administratif untuk menakutkan atau mengancam pemustaka untuk berbuat disiplin dengan mengembalikan bahan pustaka secara tepat waktu.

Penelitian ini, peneliti memfokuskan pada sanksi keterlambatan pengembalian bahan pustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penerapan sanksi tersebut adalah upaya perpustakaan untuk menjaga aset yang dimiliki serta menanamkan kedisiplinan kepada pemustaka. Ada pun sanksi yang dapat diperoleh oleh pemustaka berupa sanksi administratif yaitu:

1. Terlambat 1 hari tidak dapat meminjam selama 1 minggu;
2. Terlambat 2 hari tidak dapat meminjam selama 2 minggu;
3. Terlambat 3 hari tidak dapat meminjam selama 3 minggu;
4. Terlambat lebih dari 7 hari dicabut keanggotaannya;
5. Terlambat lebih dari 3 kali dicabut keanggotaannya.

2.5. Kedisiplinan

Westra dalam skripsi Sabaria Tarigan (2010) menyatakan bahwa “disiplin merupakan sikap tertib dari seseorang yang menunjukkan kepada peraturan-peraturan ataupun ketentuan yang telah ada dengan senang hati.” Adanya sanksi dimaksudkan untuk memaksa orang agar tetap disiplin mematuhi tata tertib serta sebagai pedoman dalam berperilaku dan bersikap. Begitu juga adanya sanksi administratif di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas yang mengharapkan pemustaka atau pengunjungnya untuk mematuhi tata tertib dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Kedisiplinan adalah suatu latihan batin yang tercermin dalam tingkah laku yang bertujuan agar orang selalu patuh pada peraturan. Durkeim dalam skripsi Wira Nur Afnida Rambe (2010) menyatakan bahwa “kedisiplinan mempunyai tujuan ganda yaitu mengembangkan suatu peraturan tertentu dalam rindak tanduk manusia dan memberinya suatu sasaran tertentu dan sekaligus membetasi cakrawalanya.” Sementara itu menurut lembaga Ketahanan Nasional (1997) kedisiplinan dapat terjadi dengan cara:

- a. Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan, dikembangkan, dan diterapkan dalam semua aspek menerapkan sanksi serta dengan bentuk ganjaran dan hukuman.
- b. Disiplin seseorang adalah produk sosialisasi sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial.

- c. Dalam pembentukan disiplin, ada pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, sehingga mampu mempengaruhi tingkah laku pihak lain ke arah tingkah laku yang diinginkannya. Dalam penelitian ini pihak yang lebih besar adalah pengelola atau petugas perpustakaan.

Penerapan sanksi pengembalian diharapkan dapat melatih pemustaka untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. Sanksi keterlambatan pengembalian merupakan suatu bentuk ganjaran atau hukuman agar pemustaka mematuhi tata tertib atau kebijakan yang berlaku. Pengelola perpustakaan yaitu petugas perpustakaan bertindak sebagai pengawas penerapan sanksi keterlambatan pengembalian di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. Petugas perpustakaan juga bertindak sebagai pelaksana atau pemberi sanksi terhadap pemustaka yang melanggar tata tertib yang berlaku.

3. Metode Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kategori survei pengalaman yakni karena dilakukan berdasarkan pengalaman petugas layanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kabupaten Banyumas.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil kuesioner dan hasil wawancara. Data sekunder berupa dokumen publikasi yakni surat keputusan kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. Skala data yang digunakan yakni tipe skala ordinal dengan skala Guttman.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi dan kedisiplinan terhadap penerapan sanksi keterlambatan pengembalian di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. Indikator – indikator tersebut akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai instrumen pengambilan data yaitu kuesioner penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi.

3.1. Uji Instrumen Pengumpulan Data

1) Uji Validitas

Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Uji validitas penelitian ini dilakukan dengan dibantu SPSS 16.

2) Uji Reliabilitas

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pengukuran reliabilitas yaitu *One Shot* atau pengukuran sekali saja (Ghozali, 2011:48). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 16 untuk uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Hasil dari uji statistik *Cronbach Alpha* (α) akan menentukan instrument yang digunakan dalam penelitian ini reliabel digunakan atau tidak.

3.2. Teknik Analisis Data

Adapun untuk menjawab pertanyaan hipotesis yaitu penerapan sanksi administratif efektif dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kabupaten Banyumas dalam mengembalikan bahan pustaka menggunakan perhitungan distribusi frekuensi dengan menghitung mean dan standar deviasi untuk dibandingkan dengan kurva normal. Menurut Dantes (2008) dalam jurnal ilmiah Ni Wayan Sukreni menggunakan kriteria ideal teoritik sebagai berikut:

(M + 1,5 SD) ke atas	: efektivitas sanksi sangat tinggi
(M + 0,5 SD) – (M + 1,5 SD)	: efektivitas sanksi tinggi
(M – 0,5 SD) – (M + 0,5 SD)	: efektivitas sanksi rendah
(M – 1,5 SD) – (M – 0,5 SD)	: efektivitas sanksi rendah
(M – 1,5 SD) ke bawah	: efektivitas sanksi sangat rendah

Dimana: M = Mean

SD = Standar Deviasi

Untuk menjawab hipotesis yang telah ditentukan efektivitas sanksi administratif akan dihitung dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Tentukan rentang/range (data terbesar-data terkecil),
2. Tentukan banyaknya kelas dengan rumus $1 + 3,3 \log n$
3. Tentukan panjang kategori (P)

$$P = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kategori}}$$
4. Pilih ujung kelas interval (data terkecil/data yang lebih kecil)

Untuk mengukur efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka

terhadap kedisiplinan pemustaka dengan rumus sebagai berikut:

5. Menghitung distribusi frekuensi dengan bantuan tabel

6. Menentukan rata-rata

$$X = \frac{\sum fx}{N}$$

7. Menghitung Standar Deviasi dengan rumus:

$$SD^2 = \frac{\sum (xi - x)^2}{N - 1}$$

8. Menginprestasikan hasil keusioner dengan kriteria ideal teoritik, sehingga akan diperoleh efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemusta di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kabupaten Banyumas.

4. Hasil Penelitian

1) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Hasil dari perhitungan dengan bantuan SPSS 16 yaitu:

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,793	0,553	Valid
2	0,825	0,553	Valid
3	0,736	0,553	Valid
4	0,662	0,553	Valid
5	0,626	0,553	Valid
6	0,609	0,553	Valid
7	0,608	0,553	Valid
8	0,837	0,553	Valid
9	0,772	0,553	Valid
10	0,759	0,553	Valid
11	0,677	0,553	Valid
12	0,844	0,553	Valid
13	0,682	0,553	Valid

14	0,698	0,553	Valid
15	0,739	0,553	Valid
16	0,739	0,553	Valid
17	0,658	0,553	Valid
18	0,627	0,553	Valid
19	0,681	0,553	Valid
20	0,645	0,553	Valid
21	0,899	0,553	Valid
22	0,845	0,553	Valid
23	0,645	0,553	Valid
24	0,774	0,553	Valid

Hasil uji validitas dari 24 pertanyaan instrumen penelitian efektivitas penerapan sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap pemustaka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas didapatkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid dengan r hitung lebih besar dari r tabel (0,553).

2) Uji Reliabilitas

Setelah instrumen di uji validitasnya maka langkah selanjutnya yaitu menguji reliabilitas. Hasil dari perhitungan dengan bantuan SPSS 16 sebagai berikut:

Cronbach's Alpha	N of Items
0.960	24

Dari hasil uji reliabilitas intrumen penelitian didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,960, yang menurut kriteria Nunally dalam buku Imam Ghazali (2005) dapat dikatakan reliabel, sehingga intrumen penelitian yang terdiri dari 24 pernyataan dikatakan reliabel.

3) Analisis Deskriptif

Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 13 responden dapat diketahui sebagian besar tujuan dari penerapan sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Banyumas telah tercapai. Adapun prosentase tercapainya tujuan penerapan sanksi administratif yaitu 49,6 % (58 responden) menyatakan tidak dan 50,4 % (59 responden) menyatakan iya. Hal ini dikarenakan 58 responden yang menjawab tidak merasa tidak semua target dan tujuan dari penerapan sanksi administratif tersebut tercapai sesuai waktu yang diperkirakan. Sedangkan 59 responden merasakan adanya perubahan positif dan manfaat dari penerapan sanksi administratif.

Integrasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 13 responden dapat diketahui bahwa penerapan sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas dilakukan sesuai prosedur dan proses sosialisasi yang baik. Hasil prosentase dari 5 pertanyaan yang dijawab oleh 13 responden yaitu sebanyak 32,3% (21 responden) menyatakan tidak dan 67,7% (44 responden) menyatakan iya. Sebanyak 21 responden yang menyatakan tidak dikarenakan sosialisasi yang dilakukan tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini hanya membawa perubahan kecil terhadap kedisiplinan pemustaka dalam mengembalikan bahan pustaka secara tepat waktu. Sedangkan 44 responden menyataka ya karena penerapan sanksi administratif sudah sesuai prosedur yang ada dan sosialisasi yang dilakukan membawa dampak positif khususnya bagi sistem sirkulasi.

Adaptasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 13 responden dengan 4 pertanyaan tentang sarana dan prasarana serta proses evaluasi penerapan sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas telah terjawab dalam penelitian ini. Dengan prosentasi sebesar 48,1% (25 responden) menjawab tidak dan sebesar 51,9% (27 responden) menjawab ya. Sebanyak 25 responden menjawab tidak dikarenakan belum adanya evaluasi berkala yang dilakukan untuk mengontrol jalannya sanksi administratif di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga sulit untuk menampung solusi – solusi guna memperbaiki atau meningkatkan layanan khususnya mengenai peneraan sanksi administratif. Sedangkan, 27

responden menjawab ya karena penerapan sanksi administratif tersebut sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta solusi – solusi terhadap kendala yang dihadapi dapat ditemukan secara langsung dalam penerapan dan pelaksanaan sehari – hari.

Kedisiplinan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 13 responden dapat menjawab bahwa penerapan sanksi administratif di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas membawa pengaruh positif terhadap kedisiplinan pemustaka dalam mengembalikan bahan pustaka secara tepat waktu. Hasil prosentase menunjukan bahwa sebesar 43,6% (34 responden) menjawab tidak dan sebesar 56,4% (44 responden) menjawab ya. Responden sebanyak 34 orang menjawab tidak dikarenakan masih ada pemustaka yang berubah menjadi lebih disiplin selama penerapan sanksi administratif. Sedangkan 44 responden menjawab ya karena adanya perubahan positif terhadap kedisiplinan pemustaka dalam mengembalikan bahan pustaka sesuai waktu yang ditentukan dan berkurangnya statistik keterlambatan pengembalian bahan pustaka.

4) Analisis Hipotesis

Perhitungan analisis hipotesis penelitian efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- a. Rentang (data terbesar – data terkecil)
 Nilai terbesar : $24 \times 2 = 42$
 Nilai terkecil : $24 \times 1 = 24$
 Rentang: $42 - 24 = 18$
 - b. Banyak kelas: 4
 - c. Panjang kelas: 4
- Mean: $X = \frac{\sum fx}{N} = 38,5$

**Distribusi Frekuensi Tentang
 Efektivitas Sanksi Administratif
 Pengembalian Bahan Pustaka
 Terhadap Kedisiplinan Pemustaka
 Kantor Perpustakaan dan Arsip
 Daerah Kabupaten Banyumas**

No.	Interval	F	x_i	$(x_i - \bar{x})^2$
1.	29 – 32	1	30,5	64

2.	33 – 36	4	34,5	16
3.	37 – 40	3	38,5	0
4.	41 – 44	5	42,5	16
Jumlah		13	146	96

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (xi - x)^2}{N-1}} = 2,8$$

Dari Tabel di atas dapat dilihat dari 13 responden diperoleh nilai Mean (M) = 38,5 dan simpangan baku atau standar deviasi (SD) = 2,8. Hasil tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan hipotesis tentang efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas dengan mengacu pada kriteria ideal teoritik sebagai berikut:

(42,5) ke atas : efektivitas sanksi administratif sangat tinggi
 (39,9 – 42,5) : efektivitas sanksi administratif tinggi
 (37,1 – 39,9) : efektivitas sanksi administratif sedang
 (34,3 – 37,1) : efektivitas sanksi administratif rendah
 (34,3) ke bawah : efektivitas sanksi administratif sangat rendah

Berdasarkan hasil perhitungan dan kriteria ideal teoritik di atas pertanyaan hipotesis penelitian ini dapat terjawab. Nilai efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas dengan skor rata – rata 38, 5 berada dalam interval **37,1 – 39,9 dengan kategori sedang.**

5. Simpulan

berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas tergolong sedang yakni skor rata – rata 38, 5 berada dalam interval 37,1 – 39,9 dengan sebagian besar tujuan tercapai, telah melewati proses integrasi dengan prosedur yang ada dan pemustaka sebagai sasaran penerapan sanksi, serta telah mampu beradaptasi dengan lingkungan.

Daftar Pustaka

- F. Rahayuningsih. 2007. *Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haris, Ivan. (2010). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPN-MP) di Desa Pulo Rogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara.” Skripsi, Universitas Sumatra Utara
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2009. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Lembaga Ketahanan Nasional dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kewiraan Buku Induk Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional
- Rahmawati, Tina. 2012. *Pembinaan dalam Menanamkan Kedisiplinan dan Pemberian Hukuman pada Anak Didik*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Pe mbinaan%20dalam%20kedisiplinan.pdf>, [14 April 2013]
- Rambe, Wira Nur Afrida. 2010. “Gambaran Kedisiplinan Siswa SMAN 14 Medan yang Menggunakan Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah.” Skripsi, WS Universitas Sumatera Utara
- Rambulangi, Christian Tulak. (2012). “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara.” -.Universitas Hasanudin
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial: sebagai kebijakan public*. Bandung: Alfabeta

- Sukreni, Ni Wayan. 2012. Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Menggunakan Pendekatan Komunikatif-Integratif pada SMA Negeri di Kabupaten Bangli. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4 (1) http://pasca.undiksha.ac.id/e-journal/index.php/jurnal_ap/issue/view/50 [30 Juni 2013]
- Suragawa, Huggo. 2010. Efektivitas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Bandung *One Stop Service* (Boss) pada Pelayanan Informasi Perizinan di Kota Bandung. Skripsi Universitas Komputer Indonesia
- Sulistyo basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia pustaka utama.
- Tarigan, Sabaria. 2010. *Hubungan Kedisiplinan dengan Prestasi Kerja Pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*. Medan, Universitas Sumatera Utara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 *Tentang Perpustakaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774